

**EVALUASI PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN
BENTENG SANROBONE TAKALAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora Pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Oleh:

INDRA ANDRIANI HAMDA

F071181310

DEPARTEMEN ARKEOLOGI

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

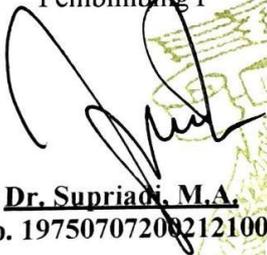
LEMBAR PENGESAHAN

Sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor:
390/UN4.9.1/KEP/2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan ini kami menyatakan
menerima dan menyetujui skripsi ini.

Makassar, 01 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Supriadi, M.A.
Nip. 197507072002121002


Yusriana, S.S., M.A.
Nip. 198407042014042001

Disetujui untuk diteruskan
Kepada Penitia Ujian Skripsi.
Dekan,

u.b. Ketua Departemen Arkeologi
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin



SKRIPSI
EVALUASI PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN
BENTENG SANROBONE TAKALAR

Disusun dan diajukan oleh

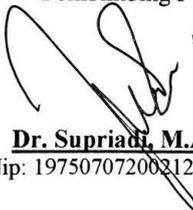
Indra Andriani Hamda
F071181310

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
Pada tanggal 12 Agustus 2022
Dinyatakan telah memenuhi syarat



Menyetujui
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I


Dr. Supriadi, M.A.
Nip: 197507072002121002

Pembimbing II


Yusriana, S.S., M.A.
Nip: 198407042014042001

Dekan
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
Nip: 196407161991031010

Ketua Departemen Arkeologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin


Dr. Rosmawati, S.S., M.Si.
Nip: 197205022005012002

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik Skripsi yang berjudul :

**EVALUASI PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN
BENTENG SANROBONE TAKALAR**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

18 Agustus 2022

Panitia Ujian Skripsi

- | | | |
|-----------------------------|---------------|-------|
| 1. Dr. Supriadi, M.A. | Ketua | |
| 2. Yusriana, S.S.,M.A. | Sekretaris | |
| 3. Dr. Erni Erawati, M.Si. | Penguji I | |
| 4. Nur Ihsan D. S.S.,M.Hum. | Penguji II | |
| 5. Dr. Supriadi, M.A. | Pembimbing I | |
| 6. Yusriana, S.S.,M.A. | Pembimbing II | |

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil ' Aalamin, puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi strata 1 (S1) pada Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : “Evaluasi Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone Takalar”. Selama penyusunan skripsi, penulis menemukan banyak hambatan dan tantangan, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi yang diajukan penulis masih jauh dari kata sempurna sebagai suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan partisipasi aktif dari berbagai pihak berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih Penulis ucapkan kepada :

1. Terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018-2022, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk menempuh pendidikan kuliah di kampus merah yang tercinta ini.

2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan kuliah di kampus merah yang tercinta ini.
3. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Prof. Akin Duli, M.A beserta jajarannya.
4. Ketua Departemen Arkeologi Dr. Rosmawati, S.S., M.Si serta staf pengajar Dr. Erni Erawati, M.Si., Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si., Dr. Anwar Thosibo, M.Hum., Dr. Yadi Mulyadi, S.S., M.A., Yusriana S.S., M.A., Dr. Supriadi., M.A., Dr. Muhammad Nur, S.S., M.A., Dr. Khadijah Tahir Muda, M.Si., Dr. Hasanuddin, M.A., Nur Ihsan D. S.S., M.Hum., Dr. H. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M.Hum., Dr. Eng. Ilham Alimuddin, S.T., M.Gis., Ir. H. Djamaluddin, MT, dan Dott. Erwin Mansyur Ugu Saraka, M.Sc.
5. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk pembimbing akademik penulis Ibu Dr. Khadijah Tahir Muda, M.Si yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Arkeologi.
6. Terima Kasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk Dosen Pembimbing Penulis Bapak Dr. Supriadi, M.A dan Ibu Yusriana S.S., M.A yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dan selalu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

7. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan untuk Bapak Syarifuddin yang sangat berdedikasi dalam menjalankan tugasnya dalam bidang Administratif. Terima kasih telah mengemban amanah dengan baik dan luar biasa.
8. Terima kasih penulis ucapkan pada saudari tercinta Dian Budiana Hamda, yang menjadi salah satu teladan bagi penulis. Terimakasih atas dukungan, motivasi dan saran yang tak henti-hentinya diberikan pada penulis. Terimakasih pada kakak ipar Syamsurya Pratama yang juga tak henti-hentinya memberikan dukungan pada penulis. Serta keponakan tercinta, Zirrin Raya Pelangi yang menjadi salah satu sumber semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih pada teman terbaik Penulis Muh. Arif Hidayat yang selalu memberi dorongan dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Serta Terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman tim penelitian Kasnia, A. Nurfadillah, Arista Puteri Dewi, Meira Syahrani Sayidina yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis selama pengumpulan data.
10. Terima kasih penulis ucapkan untuk sahabat-sahabat penulis, Ade Amelyani Saputri, Kasnia, Mela Mauliana, A. Tari Bahrani, Firda Asrani yang telah memberikan banyak pengalaman yang berkesan kepada penulis.
11. Terima kasih pada teman-teman “Arkeologi 2018” Nurul Izza Khaerunnisa, Kartika Sari, Salna Dafanjani, Ririn Awlya, Andi Nurfadillah, Lisda Amaliana Usfira, Zulkifli, Nur Ismi Aulia, Fifin

Arianti, Regita Cahyani Syam, Alfrida Limbong Allo, Ashrullah Djalil, Annisa Musfira Ahmad, Andini Dwi Putri, Kasnia, Fadia Ayu Lestari, Novianti Lepong, Risky Nur Mutmainah, St. Nurlaila, Siti Alfiah, Lalu Muhammad Balia Farsahin, Muh. Arif Hidayat, Muh. Nur Taufiq, Muhammad Nur Akram A.N, Muh. Hafdal H, Riska Maulida, Muhammad Algis, Khainun, Muhammad Agang, Perayanti, Aditya Joseph Mesalayuk dan Abimayu Rezky Januar yang telah berproses bersama dari tahun 2018 hingga sekarang. Terima kasih untuk suka duka yang sangat berkesan.

12. Terima kasih penulis ucapkan untuk seluruh warga Kaisar (Keluarga Mahasiswa Arkeologi) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berlembaga.
13. Teman-teman Kopma Unhas yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaan yang tercipta dan pengalaman yang luar biasa yang diberikan kepada penulis.
14. Terima kasih penulis ucapkan juga untuk teman-teman KKN UNHAS Gelombang 107 Wilayah Takalar 8, yang juga membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian selama ber-KKN di Desa Sanrobone.

Skripsi ini khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta. Etta yang selalu mecurahkan kasih sayang untuk penulis, mendidik penulis dengan segala nasihat yang menjadi pegangan penulis dalam bertindak. Terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi pahlawan yang sesungguhnya dalam kehidupan penulis. Mama yang tak henti-hentinya mendidik,

memberikan nasihat kepada penulis untuk menjadi manusia yang bermanfaat kepada sesama. Terimakasih yang sebesar-besarnya karena selalu menjadi tempat ternyaman bagi penulis untuk berkeluh kesah. Kalian adalah alasan utama bagi penulis ingin cepat-cepat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu arkeologi kedepannya dan penulis berharap semoga Allah SWT. membalas kebaikan-kebaikan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini. *Aamiin Ya Rabbal Alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 6 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENERIMAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Landasan Konseptual.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	19
BAB II PROFIL WILAYAH.....	26
2.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	26
2.1.1 Keadaan Lingkungan.....	26
2.1.2 Kondisi Sosial-Ekonomi.....	27
2.1.3 Tradisi/Kebudayaan.....	29
BAB III POTENSI SUMBERDAYA ARKEOLOGI DAN NILAI PENTING.....	30
3.1 Potensi Sumberdaya Arkeologi.....	30
3.2 Nilai Penting Kawasan Benteng Sanrobone.....	44
3.2.1 Nilai Penting Sejarah.....	44
3.2.2 Nilai Penting Ilmu Pengetahuan.....	46
3.2.3 Nilai Penting Ekonomi.....	47

BAB IV PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN BENTENG

SANROBONE.....	50
4.1 Upaya Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah.....	50
4.1.1 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat.....	50
4.1.2 Pembangunan Fasilitas.....	51
4.1.3 Penyusunan Konsep Rencana Pengelolaan.....	52
4.2 Upaya Pelestarian oleh Pemerintah Pusat.....	53
4.2.1 Ekskavasi Penyelamatan.....	53
4.2.2 Pemetaan.....	54
4.2.3 Pemugaran.....	55
4.2.4 Pelaksanaan Studi Teknis.....	56
4.2.5 Survei.....	56
4.2.6 Pelaksanaan Zonasi.....	56
4.3 Evaluasi Pelestarian dan Pengelolaan.....	57
4.3.1 Upaya Pelindungan.....	57
4.3.2 Upaya Pengembangan.....	62
4.3.3 Upaya Pemanfaatan.....	64
BAB V PENUTUP.....	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	XVIII

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Sebaran Sumberdaya Arkeologi.....	30
Gambar 2. Dinding Utara Benteng.....	32
Gambar 3. Dinding Barat Benteng.....	32
Gambar 4. Dinding Timur Benteng.....	32
Gambar 5. Kondisi Struktur.....	32
Gambar 6. Bastion Mallaga.....	34
Gambar 7. Bastion Mallaga.....	34
Gambar 8. Bastion Jonggoa.....	35
Gambar 9. Kondisi Bastion Jonggoa.....	35
Gambar 10. Bastion Lolo Bayo.....	36
Gambar 11. Saukang.....	37
Gambar 12. Lingkungan Bastion.....	37
Gambar 13. Makam Raja Sanrobone.....	38
Gambar 14. Makam Raja Sanrobone.....	38
Gambar 15. Makam Kare Panca Belong.....	39
Gambar 16. Makam Kare Panca Belong.....	39
Gambar 17. Kondisi Makam Gaddong.....	40
Gambar 18. Makam Tamma Danggang.....	41
Gambar 19. Sumur Tua.....	42
Gambar 20. Sumur Tampak Samping.....	42
Gambar 21. Mesjid Tampak depan.....	43
Gambar 22. Mimbar Mesjid.....	43
Gambar 23. Pintu Mesjid.....	43
Gambar 24. Bedug Mesjid.....	43
Gambar 25. Meriam.....	44
Gambar 26. Meriam.....	44
Gambar 27. Struktur Benteng yang Dipugar.....	56
Gambar 28. Kondisi Papan Informasi.....	69
Gambar 29. Kondisi Papan Informasi.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sanrobone.....	27
Tabel 2. Jenis Pekerjaan Masyarakat Sanrobone.....	28
Tabel 3. Keadaan Pendidikan Masyarakat Sanrobone.....	28
Tabel 4. Kandungan Nilai Penting Kawasan Benteng Sanrobone.....	38
Tabel 5. Riwayat Pelestarian Kawasan Benteng Sanrobone.....	53
Tabel 6. Tingkat Kepuasan Pengunjung terhadap Akses.....	67
Tabel 7. Tingkat Kepuasan Pengunjung terhadap Papan Informasi.....	68
Tabel 8. Tingkat Kepuasan Pengunjung terhadap Sarana Prasarana.....	69
Tabel 9. Tingkat Kepuasan Pengunjung terhadap Kebersihan.....	71
Tabel 10. Tingkat Kepuasan Pengunjung terhadap Publikasi.....	72
Tabel 11. Tingkat Kepuasan Pengunjung terhadap Pemeliharaan.....	73
Tabel 12. Tingkat Kepuasan Pengunjung terhadap Tarif Retribusi.....	75
Tabel 13. Tingkat Kepuasan Pengunjung terhadap Kenyamanan.....	76

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Persentase Kepuasan Pengunjung terhadap Akses.....	67
Diagram 2. Persentase Kepuasan Pengunjung terhadap Papan Informasi.....	68
Diagram 3. Persentase Kepuasan Pengunjung terhadap Sarana Prasarana.....	70
Diagram 4. Persentase Kepuasan Pengunjung terhadap Kebersihan.....	71
Diagram 5. Persentase Kepuasan Pengunjung terhadap Publikasi.....	72
Diagram 6. Persentase Kepuasan Pengunjung terhadap Pemeliharaan.....	74
Diagram 7. Persentase Kepuasan Pengunjung terhadap Tarif Retribusi.....	75
Diagram 8. Persentase Kepuasan Pengunjung terhadap Kenyamanan.....	77

ABSTRAK

Indra Andriani Hamda. “Evaluasi Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone Takalar” dibimbing oleh *Supriadi* dan *Yusriana*.

Kawasan Benteng Sanrobone merupakan salah satu kawasan yang kaya akan potensi sumberdaya arkeologi. Potensi arkeologi pada Kawasan Benteng Sanrobone antara lain Struktur Benteng Sanrobone, Struktur Bastion, Kompleks Makam Raja Sanrobone, Makam Kare Panca Belong, Makam Gaddong, Makam Tamma Danggung, Sumur Tua, Masjid Tua Sanrobone dan meriam. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis, pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, penulis bermaksud meninjau kembali riwayat pelestarian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pengelolaan Pemerintah Daerah terhadap Kawasan Benteng Sanrobone, serta melakukan evaluasi terhadap pelestarian dan pengelolaan yang telah terealisasi dengan tetap mengacu pada UU No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya dan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Adapun tahap pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data pustaka, survei lapangan, wawancara dan penyebaran kuesioner penelitian. Hasil dari keempat metode pengumpulan data yang dilakukan kemudian diolah dan diinterpretasi untuk mendapatkan satu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa belum maksimalnya pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone. Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Benteng Sanrobone, dan kurang maksimalnya koordinasi antar sektor dalam bidang kebudayaan.

Kata Kunci : Pelestarian, Pengelolaan, Pemerintah, Kawasan Benteng Sanrobone

ABSTRACT

Indra Andriani Hamda. “Evaluation of Conservation and Management of the Sanrobone Takalar Fort Area” guided by *Supriadi* and *Yusriana*.

The Sanrobone Fort area is one area that is rich in potential archaeological resources. The archaeological potential in the Sanrobone Fort area includes the Sanrobone Fort Structure, Bastion Structure, King Sanrobone Tomb Complex, Kare Panca Belong Tomb, Gaddong Tomb, Tamma Danggung Tomb, Old Well, Old Sanrobone Mosque and cannons. However, based on the author's observations, the preservation and management of the Sanrobone Fort area has not been carried out optimally. Therefore, the author intends to review the history of preservation that has been carried out by the Central Government and Local Government management of the Sanrobone Fort area, as well as evaluate the conservation and management that has been realized by referring to the Cultural Heritage Law no. 5 of 1992 and Cultural Heritage Law no. 11 of 2010. The stages of data collection used in this study were library data collection, field surveys, interviews and distribution of research questionnaires. The results of the four data collection methods were then processed and interpreted to get a conclusion. The results of this study explain that the preservation and management of the Sanrobone Fort area has not been maximized. This is due to the lack of effort from the Regional Government in managing the Sanrobone Fort, and the lack of maximum coordination between sectors in the cultural field.

Keywords: Conservation, Management, Government, Sanrobone Fort Area

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Disiplin ilmu arkeologi pada dasarnya mengkaji kebudayaan masa lampau. Salah satu yang menjadi penekanannya adalah sumberdaya budaya. Hal ini muncul sebagai kesadaran terhadap pentingnya upaya pelestarian sumberdaya arkeologi. Mengingat sifat sumberdaya arkeologi yang tidak terbarukan (*unrenewable*), terbatas (*finite*), rapuh (*fragile*), dan kontekstual. Manajemen sumberdaya budaya merujuk pada istilah *Cultural Resource Management* yang pertama kali mulai dikenal di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1980-an. Kajian pengelolaan ini muncul di Indonesia sekitar tahun 1990-an ketika ilmu arkeologi dihadapkan pada persoalan pembangunan yang memerlukan bentuk pengelolaan untuk menjawab tantangan pengembangan dan pemanfaatan (Sulistyanto, 2014 : 139).

Merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, manajemen sumberdaya budaya terkait dengan dua kegiatan, yaitu pengelolaan dan pelestarian. Pengelolaan Cagar Budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan pelestarian Cagar Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

Salah satu sumberdaya arkeologi yang penting untuk dilestarikan dan dikelola adalah benteng. Benteng merupakan sumberdaya arkeologis yang

berfungsi sebagai tempat berlindung atau bertahan dari serangan musuh. Benteng didirikan atas dasar motivasi untuk melakukan upaya pertahanan terhadap sebuah wilayah demi keamanan bersama. Pembangunan benteng selalu tidak terlepas dari fungsi pertahanan. Motif pembangunan sebuah benteng memiliki dua prinsip, (1) untuk mempertahankan diri dari serangan pihak luar/musuh, dan (2) untuk mempertahankan nafsu kekuasaan di tempat yang dikuasai (Hanafiah, 1989 : 23; Hatmini, 2019 :58). Pembangunan benteng selalu berada di sekitar wilayah pantai, hal tersebut bertujuan agar fungsi benteng sebagai benteng pertahanan dapat berfungsi secara maksimal, mengingat aktivitas masyarakat pada saat itu seringkali menggunakan jalur laut (Kartodirdjo, 1999 : 20; Hatmini, 2019 :58).

Peninggalan arkeologis berupa benteng banyak tersebar di Indonesia, termasuk daerah Sulawesi Selatan. Menurut data Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA), terdapat 257 benteng peninggalan bangsa asing di Indonesia dan hanya 5% dari jumlah tersebut dalam kondisi utuh. Data PDA menunjukkan bahwa kondisi benteng-benteng tersebut tinggal sisa dan reruntuhannya saja. Kerusakan benteng-benteng tersebut dominan disebabkan oleh pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, maupun masyarakat sekitar benteng (Sawahlunto,24 Agustus 2008). pembiaran yang dilakukan berpotensi besar merusak sumberdaya arkeologis, karena apabila sumberdaya arkeologi tersebut hilang maka tidak dapat dimunculkan kembali.

Khusus di Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 32 benteng yang difungsikan sebagai benteng pertahanan pada masa lampau. Kondisi benteng-benteng tersebut memprihatinkan, sebagian besar musnah, rusak bahkan beralih fungsi, salah

satunya adalah Benteng Sanrobone. Hasil penelitian dari David Bulbeck, Tahun 1986, dalam tulisannya *The South Sulawesi Prehistorical and Historical Archaeology Project* (SSPHAP) merupakan referensi utama dalam upaya pemahaman terhadap keberadaan Benteng Sanrobone dan latar sejarahnya secara lebih luas. Fokus penelitian David Bulbeck adalah melakukan survei dan beberapa penggalian arkeologis dan pelacakan keberadaan bagian benteng-benteng di wilayah kekuasaan kerajaan Gowa dan Tallo.

Penyelamatan situs Benteng Sanrobone mulai dilakukan pada tanggal 20-26 Januari 1992. Kegiatan penyelamatan ini dilaksanakan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan Tenggara Ujung Pandang. Hasil dari upaya penyelamatan ini adalah ditemukannya artefak keramik, batu bata, logam, besi, molusca, tulang dan temuan lain yang mengindikasikan bahwa daerah Sanrobone merupakan salah satu bandar niaga dan sebagai pusat permukiman pada masa lampau (Ramli dkk, 1992 :15-47).

Merujuk pada hasil pelacakan peta lama yang telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) tahun 2010, Benteng Sanrobone merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Gowa sekaligus tempat bermukimnya raja yang berada di dalam benteng, sebagai bandar niaga internasional, serta sebagai kota besar. Referensi yang digunakan dalam pelacakan adalah peta yang bersumber dari *Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Archipel En Ocenie/Malay Archipelago and Oceania III*, yakni pada peta “*De Stadt Samboppe Intryck Macasser*” (Anonim, 2010 :46). Indikasi lain yang membuktikan bahwa Kawasan Benteng Sanrobone telah digunakan sebagai pusat permukiman sejak lama adalah

ditemukannya Struktur Benteng, Struktur Bastion, Kompleks Makam Kare Panca Belong, Kompleks Makam Gaddong, Makam Tamma Danggung, sumur tua, Masjid Tua Sanrobone, Kompleks Makam Raja-raja Sanrobone serta meriam yang berada dalam satu kawasan.

Upaya perlindungan Benteng Sanrobone telah dilakukan pada tahun 2010 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dengan berupaya menetapkan zonasi pada benteng (Anonim, 2010 :2). Kegiatan pengabdian masyarakat yang mencoba melakukan upaya perlindungan Kawasan Benteng Sanrobone juga telah dilakukan oleh Akhmad Faizal dkk dalam program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) dari Kemenristekdikti. Tujuan utama kegiatan ini adalah penyadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir utamanya ekosistem mangrove bagi kehidupan mereka sebagai pelindung pantai dari kejadian abrasi, berhubung Kawasan Sanrobone sebagian besar menempati areal pesisir pantai. Dari kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi desa mereka untuk menjadi daerah kunjungan wisata alam dan budaya yang bermula dari pemeliharaan Cagar Budaya sebagai objek wisata. (Faizal dkk, 2019 : 280-292).

Benteng Sanrobone belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Namun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar tahun 2012-2031 telah menetapkan lokasi Desa Sanrobone (Kecamatan Sanrobone) sebagai lokasi budidaya perikanan payau dan laut (BPPD Kabupaten Takalar, 2012). Hal inilah yang membuat pengelolaaninggalan arkeologis pada Kawasan Benteng Sanrobone kurang optimal. Padahal

Benteng Sanrobone memiliki beragam potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan, meliputi potensi sejarah, arkeologis, geologis, budaya baik berupa *local wisdom* maupun *indigeneous knowledge* dan potensi alam.

Merujuk pada hasil kajian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) pada tahun 2010, menyebutkan bahwa potensi ancaman yang ditemui pada Kawasan Benteng Sanrobone adalah adanya kerusakan mekanis, pelapukan biologis, khemis, pencemaran situs, adanya tambak dalam lokasi benteng, akses jalan yang kurang mendukung, padatnya permukiman penduduk, serta penggalian liar yang berpotensi besar merusak Kawasan Benteng Sanrobone. (Anonim, 2010 :1-47).

Berdasarkan hasil observasi Penulis, pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dapat kita lihat pada kondisi papan UU Cagar Budaya yang sudah mengalami kerusakan, pelapukan pada struktur, pencemaran pada lingkungan situs, lingkungan situs yang kurang terawat serta penempatan tinggalan arkeologis yang tidak seharusnya. Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan Penulis, Benteng Sanrobone merupakan benteng yang pelestarian dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan. Namun upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan Benteng Sanrobone belum sepenuhnya maksimal.

Berdasarkan kondisi di atas, Penulis bermaksud mengungkap nilai penting Benteng Sanrobone sebagai kawasan yang kaya akan sumberdaya arkeologi,

meninjau kembali riwayat pelestarian yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan pengelolaan Pemerintah Daerah terhadap kawasan Benteng Sanrobone, serta melakukan evaluasi terhadap pelestarian dan pengelolaan yang sudah terealisasi dengan tetap mengacu pada UU No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya dan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Evaluasi yang dilakukan, bertujuan untuk mengetahui bentuk kesenjangan yang terjadi pada upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan Benteng Sanrobone.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah cenderung melihat Cagar Budaya sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, khususnya pemanfaatan Cagar Budaya sebagai daya tarik wisata. Kecenderungan ini dapat dipahami, karena pemanfaatan sumberdaya budaya sebagai objek wisata berpotensi menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa. Akan tetapi, upaya pemerintah dalam mengelola sumberdaya budaya belum sepenuhnya optimal. Seringkali sumberdaya yang dimanfaatkan, belum siap untuk dijadikan sebagai objek wisata.

Hal tersebut dapat berakibat pada kerusakan ataupun kepunahan sumberdaya budaya. Kenyataan yang terjadi di Indonesia sekarang, tidak semua warisan budaya mendapat perhatian dari pemerintah, hal tersebut dikarenakan jumlah warisan budaya yang ada di Indonesia terbilang banyak. Lokasi warisan budaya yang jauh dari pusat pemerintahan kurang mendapat perhatian, sedangkan warisan budaya yang berlokasi di perkotaan kondisinya terancam karena perebutan lahan untuk kepentingan ekonomi, ataupun kepentingan lain yang bertolakbelakang dengan kepentingan arkeologi.

Berdasarkan masalah di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya pelestarian dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terhadap Benteng Sanrobone?
2. Apa saja hasil evaluasi pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui upaya pelestarian dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terhadap Benteng Sanrobone.
2. Memberikan informasi mengenai evaluasi pelestarian dan pengelolaan yang telah dilakukan terhadap Benteng Sanrobone.

1.3.2 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui upaya pelestarian dan pengelolaan yang telah dilakukan terhadap Benteng Sanrobone.
2. Memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelestarian dan pengelolaan yang telah terealisasi.
3. Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Landasan Konseptual

1.4.1 *Cultural Resource Management (CRM)*

Pengelolaan sumberdaya budaya (CRM) dikembangkan sebagai aspek penting arkeologi dalam tiga dekade terakhir abad ke-20. Kekhawatiran untuk melindungi catatan arkeologi menyebabkan pembentukan bidang tertentu yang

dikenal sebagai manajemen sumberdaya budaya (CRM)/manajemen warisan budaya (CHM) selama tahun 1970-an. CRM awalnya berasal dari sub bidang arkeologi penyelamatan yang berkaitan dengan perlindungan, dokumentasi dan penilaian, kurasi, interpretasi, pelestarian dan pemulihan sisa-sisa arkeologi. Baru-baru ini CRM mencakup upaya untuk melindungi dan menafsirkan budaya tidak berwujud (Timothy, et al. 2020).

Davis menyatakan orientasi CRM untuk melestarikan sumberdaya arkeologi bukan semata-mata untuk mode, akan tetapi CRM merupakan pendekatan yang diperlukan saat ini mengingat sumberdaya arkeologi yang semakin berkurang. Situasi ini semakin diperparah dengan semakin sulitnya akses terhadap peluang penelitian di negara berkembang. Ciri umum yang terlihat sekarang beberapa arkeolog menyebut dirinya sebagai “konsultan budaya”, sementara yang mereka lakukan bukanlah hal yang baru/tidak melampaui pekerjaan arkeologi biasanya. Agbaje-Williams dan Ogundiran mendefinisikan CRM sebagai praktek humanistik yang berusaha untuk mempromosikan kesadaran budaya melalui penelitian, konservasi, dan pendidikan untuk tujuan meningkatkan perkembangan budaya dalam kelompok, selalu berusaha untuk mengeksploitasi sumberdaya budaya untuk kemajuan sosial ekonomi (Williams, et al. tt.: 55-60).

CRM merupakan upaya pengelolaan sumberdaya budaya yang mempertimbangan berbagai kepentingan banyak pihak, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Kinerja CRM tidak hanya berfokus pada aspek pelestarian dan penelitian, tetapi memikirkan bagaimana sumberdaya arkeologi

tidak lagi terlihat sebagai benda mati, akan tetapi memiliki kebermaknaan sosial di tengah masyarakat (Sulistyanto, tanpa tahun :2).

Ada beberapa alasan mengapa Sumberdaya arkeologi penting untuk dilestarikan. Pertama adalah sifat dari sumberdaya arkeologi tidak dapat diperbaharui, terbatas, tidak bisa diganti dan kontekstual. Kedua, adanya kesadaran bahwa sumberdaya arkeologis dapat mengalami kerusakan ataupun musnah yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia. Jika sebuah benda arkeologis kehilangan konteks maka tidak dapat memberikan informasi apa-apa.

Selain itu, apabila sumberdaya arkeologi tersebut hilang maka tidak dapat dimunculkan kembali. Ketiga adanya berbagai kepentingan diluar kepentingan arkeologi itu sendiri, antara lain kepentingan pariwisata, ekonomi, masyarakat, dan generasi mendatang. Keempat adalah pembangunan atau pengembangan yang berkelanjutan. Pengelolaan terhadap sumberdaya arkeologi dilakukan bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi bagaimana pengelolaan tersebut dapat berjalan secara terus menerus. Kelima adalah aspek hukum dan politis (Supriadi, tanpa tahun : 6).

Sumberdaya arkeologi penting untuk dilestarikan karena mempunyai banyak potensi, antara lain :

- a) *Scientific research*, artinya sumberdaya arkeologi dapat memenuhi kepentingan disiplin ilmu lain, tidak hanya memenuhi kepentingan arkeologi ataupun para ahli arkeologi saja. Disiplin ilmu lain dapat memanfaatkan potensi arkeologis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b) *Creative arts*, artinya sumberdaya arkeologi dapat dijadikan sumber inspirasi oleh sastrawan, penulis, seniman maupun fotografer.
- c) *Education*, sumberdaya arkeologi mempunyai peranan penting bagi ilmu pengetahuan, terutama bagi anak-anak sekolah dan generasi muda.
- d) *Recreation and tourism*, salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya arkeologi adalah dengan memanfaatkannya sebagai objek wisata. Pemanfaatan sumberdaya arkeologi sebagai objek wisata dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi.
- e) *Symbolic representation*, artinya sumberdaya arkeologi berfungsi sebagai gambaran secara simbolis bagi kehidupan manusia, terutama bagi yang mempercayainya.
- f) *Legitimation of action*, artinya sumberdaya arkeologi dapat dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi suatu kondisi tertentu. Sebagai contoh, sumberdaya arkeologi dijadikan sebagai alat politis untuk memperkuat kedudukannya.
- g) *Social solidarity and integration*, keberadaan sumberdaya arkeologi dapat memotivasi suatu solidaritas dan integrasi yang kuat dalam suatu masyarakat.
- h) *Monetary and economic gain*, sumberdaya arkeologi yang sifatnya langka dan unik serta dapat difungsikan sebagai objek wisata dapat mendatangkan keuntungan bagi daerah dan masyarakat sekitarnya (Darvill, 1995: 44-45 ; Kasnowihardjo, 2001 :15-17).

Selain itu, sumberdaya arkeologi terutama yang bersifat monumental atau termasuk dalam klasifikasi benda tidak bergerak beserta lingkungannya mempunyai sifat-sifat yang unik karena mempunyai nilai tambah seperti potensi ekologis, arsitektonis, historis maupun geologis. Melihat potensi arkeologi yang begitu besar maka dari itu diperlukan berbagai upaya untuk menyelamatkan sumberdaya arkeologi dari bahaya kerusakan. Kegiatan pemugaran Cagar Budaya tidak hanya ditujukan pada penanganan fisik bangunan tetapi juga termasuk penataan lahan yang menjadi bagian integral dari bangunan, dengan tujuan selain untuk melindungi dan memelihara kelestarian bangunan juga diarahkan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatannya bagi kunjungan wisata.

Setiap pengembangan situs yang di dalamnya terdapat Cagar Budaya diharapkan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestariannya, sehingga nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung di dalamnya akan tetap dipertahankan dan dimanfaatkan seluas-luasnya dengan benar. Merujuk pada Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 pasal 53, secara garis besar ada beberapa prinsip-prinsip pelestarian yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pelestarian situs Cagar Budaya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti konsep keaslian lingkungan masa lalu termasuk peninggalan di dalamnya, dan ketentuan yang mengatur tentang penataan ruang dan lingkungan hidup agar tidak terjadi benturan kepentingan dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya.

2. Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan harus memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis-administratif maupun yuridis-formal, serta bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan secara lintas sektoral. Untuk itu, aspek akademis merupakan hal yang paling mendasar dalam membantu memberikan kejelasan terhadap nilai sejarah kepurbakalaan yang terkandung di dalam situs Cagar Budaya.
3. Situs Cagar Budaya yang secara yuridis formal telah ditetapkan wajib ditata dan dipelihara dengan memprioritaskan penanganan terhadap peninggalan yang ada dengan cara merawat dan memugar serta menata lingkungan sesuai kebutuhan.
4. Pendokumentasian terhadap peninggalan yang terdapat dalam suatu situs Cagar Budaya sangatlah penting, mengingat sifatnya yang mudah rusak, dengan cara merekam dalam bentuk verbal dan dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Konsep pengelolaan yang diterapkan di Indonesia saat ini masih menjadi monopoli pemerintah yang berorientasi pada pengelolaan situs sebagai entitas bendawi (Prasojo, 2000 : 153 ; Sulistyanto, tanpa tahun : 17). Sementara, perilaku masyarakat yang kurang berkembang seringkali menyatukan mitos dan sejarah untuk menciptakan sebuah tradisi. Anggota suku/kelompok masyarakat yang terikat dengan kepercayaan yang sama biasanya menganggap sakral situs arkeologi seperti pemakaman dan digunakan sebagai wujud peralatan spiritual. Tetapi manifestasi lain dari perkembangan sosial kelompok, mereka menganggap

bahwa tempat tinggal/benteng yang terletak dalam wilayah mereka tidak memiliki asosiasi dengan budaya mereka. Sehingga dapat dihancurkan/diabaikan, dengan kata lain tidak memiliki nilai penting (Cleere, 1989 : 6).

Perbedaan kepentingan beberapa pihak seringkali menjadi faktor pemicu munculnya konflik pemanfaatan warisan budaya. Untuk menghindari konflik kepentingan, setidaknya terdapat tiga kelompok yang perlu dilibatkan dalam pemanfaatan sumberdaya arkeologi, antara lain akademisi, pemerintah dan masyarakat. Akademisi memiliki kewajiban untuk mengkaji dan meneliti guna menemukan pengetahuan baru serta membantu pemerintah memberikan saran dan pertimbangan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi. Sementara itu, pemerintah memiliki tanggung jawab mengatur dan mengkoordinir pengelolaan sumberdaya arkeologi. Sedangkan masyarakat pada hakekatnya adalah pemegang penuh hak atas pemanfaatan sumberdaya arkeologi (Leod, 1977 : 64-70 ; Sulistyanto, tanpa tahun : 22).

1.4.2 Nilai Penting

Langkah kerja *Cultural Resource Management* (CRM) ada empat tahap yaitu (1) identifikasi warisan budaya yang meliputi pendugaan nilai penting dan pendugaan peluang dan hambatan pengelolaannya, (2) penentuan rencana kebijakan, (3) strategi pelaksanaan pengelolaan, dan (4) monitoring pelaksanaan (Pearson, 1995 : 12). Merujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tepatnya pada Bab III tentang kriteria Cagar Budaya pasal 5 menyebutkan ada 4 kriteria benda, bangunan dan struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya.

Pertama, berusia 50 tahun atau lebih; kedua mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun; ketiga, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan; keempat, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Penentuan nilai penting sumberdaya arkeologi merupakan tahapan yang paling penting karena menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan apakah Cagar Budaya tersebut akan dikonservasi, dihancurkan, dimodifikasi atau dibiarkan begitu saja (Pearson, 1995 :8).

Menurut Daud Aris Tanudirjo, kriteria nilai penting Cagar Budaya terdiri dari nilai penting ilmu pengetahuan, nilai penting substantif, nilai penting publik, nilai penting ilmu sosial, nilai penting antropologis, nilai penting metodologis teoritis, nilai penting estetis, hukum, kelangkaan dan nilai penting pendanaan (Tanudirjo, tanpa tahun ; Asmunandar, 2016). Michael pearson dan Sharon Sullivan membagi kriteria nilai penting menjadi dua yakni nilai penting alam dan nilai penting budaya.

Nilai penting budaya sendiri terdiri dari atas lima, yakni nilai penting estetik, arsitektur, sejarah, ilmu pengetahuan dan sosial (Pearson, 1995 :8). Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan kriterianya nilai penting terdiri dari nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Sedangkan Schiffer dan Gumerman memberikan kriteria nilai penting Cagar Budaya yang terdiri dari nilai penting ilmu pengetahuan, sejarah, etnik, hukum, pendanaan, publik dan nilai penting estetik (Tanudirjo, tanpa tahun ; Asmunandar, 2016).

Benda Cagar Budaya dapat dikatakan memiliki nilai penting sejarah apabila sumberdaya tersebut dapat menjadi bukti peristiwa penting yang terjadi di masa prasejarah maupun sejarah (Tanudirjo, 2004 ; Sunarto, 2017 : 24). Nilai penting ilmu pengetahuan apabila sumberdaya budaya tersebut mempunyai potensi untuk menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan (Tanudirjo, 2004: 6-7 ; Purnawibowo, 2015). Nilai penting pendidikan, apabila sumberdaya tersebut memiliki peranan yang penting bagi anak-anak dan remaja (Darvill, 1995 : 47).

Dikatakan memiliki nilai penting kebudayaan apabila sumberdaya tersebut terkait dengan hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, serta dapat menjadi jati diri bangsa atau komunitas tertentu (Tanudirjo, 2004: 8 ; Asmunandar, 2016). Sedangkan kriteria nilai penting ekonomi adalah kemampuan sumberdaya arkeologi menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi (Purnawibowo, 2014 : 64). Kriteria nilai penting ini merupakan pengembangan dari pendapat Darvill (1995, 43) yang merinci nilai kegunaan suatu sumberdaya arkeologi pada aspek ekonomi.

14.3 Evaluasi

Sejarah evaluasi dimulai di Tiongkok pada tahun 2000 SM. Evaluasi dipergunakan untuk mengevaluasi para pegawai kerajaan. Pada abad ke 19 Inggris membentuk *Royal Commission* yang bertugas mengevaluasi layanan publik. Dalam perkembangannya, ilmu evaluasi berkembang menjadi suatu cabang ilmu yang mandiri di Amerika Serikat dengan ditemukannya teori evaluasi pertama oleh Ralph Tyler (Akbar, 2018 :1-2). Evaluasi mulai dilaksanakan di Indonesia pada

zaman penjajahan Belanda. Evaluasi digunakan pada saat itu untuk menilai kualitas produk dari hasil jaranan rempah-rempah. Selain itu, evaluasi pada saat itu juga digunakan untuk menilai kinerja pegawai penjajah dan konditite tentara dan polisi penjajahan (Wirawan, 2012: 30 ; Akbar, 2018: 2-3).

Beberapa pakar lebih terperinci menjelaskan tujuan dari evaluasi adalah untuk mengukur pengaruh program terhadap masyarakat, menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana, apakah memenuhi ketentuan undang-undang, mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*, mengambil keputusan mengenai program, mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar untuk mengidentifikasi dimensi yang berjalan dan tidak berjalan, memberikan *feed back* bagi pimpinan dan staf, serta mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi (Dunn, 2000).

Beberapa pakar evaluasi mengungkapkan evaluasi merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dengan standar-standar prosedur yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan. Evaluasi akan memberikan hasil dan dampak dari program dan kebijakan tersebut yang bisa digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya (Stufflebeam, 2003).

Evaluasi kebijakan adalah suatu alat analisis yang menyelidiki program kebijakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penilaian kinerja, baik proses maupun hasil, dan pada tahap kedua evaluasi merupakan fase dari siklus kebijakan yang umumnya mengacu pada pelaporan informasi tersebut

kembali ke proses pembuatan kebijakan (menghasilkan rekomendasi) (Wollman, 2007). Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Subarsono (2011:120-121) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan, yakni

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome suatu kebijakan)
4. Mengukur dampak suatu kebijakan
5. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang

Ada dua jenis metode yang bisa digunakan dalam pelaksanaan evaluasi yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kualitatif, biasanya berfokus pada pemahaman proses. Beberapa metode kualitatif antara lain termasuk wawancara, pengamatan dan pemetaan masyarakat. Menurut waktu pelaksanaan, terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada waktu pelaksanaan, temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaannya. Sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan pada saat prioritas. Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan prioritas (Anonim, 2014) .

Ada tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam evaluasi yakni evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi proses keputusan teoritis. Evaluasi semu merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat. Evaluasi formal merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Sedangkan evaluasi proses keputusan teoritis merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders (Dunn, 1999 ; Subarsono, 2011: 124).

Secara umum, Dunn (2000:30) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, yakni

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4. Perataan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?

5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai)?

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007: 3 ; Irvan, tanpa tahun : 1). Dalam operasionalnya, pengumpulan data terbagi menjadi dua yakni pengumpulan data kepustakaan dan data lapangan.

Pada pengumpulan data, penelitian ini menggunakan 4 tahap yakni pengumpulan data pustaka, survei, wawancara serta penyebaran kuesioner penelitian. Penggunaan data kepustakaan sebagai sumber rujukan dalam penyusunan skripsi, sedangkan data lapangan dikumpulkan melalui kegiatan survei, wawancara dan penyebaran kuesioner penelitian. Penulis menggunakan metode penyebaran kuesioner penelitian dan wawancara karena jenis penelitian ini bersifat *applied research*, yakni jenis penelitiannya lebih menekankan pada aspek manfaat untuk memenuhi kebutuhan praktis masyarakat (Sulistyanto, tanpa tahun : 25-26). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan tiga tahapan penelitian yaitu, tahap pengumpulan data, pengolahan data dan interpretasi data.

1.5.1 Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu pengumpulan data pustaka dan pengumpulan data lapangan.

1. Data Pustaka

Pengumpulan data pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan referensi penelitian dan sebagai sumber rujukan dalam penyusunan skripsi. Proses pengumpulan data pustaka dilakukan dengan mencari referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data pustaka diambil dari Skripsi, Artikel, Jurnal, Buku serta Laporan Penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diangkat.

2. Survei Lapangan

Pada tahap ini, penulis melakukan kunjungan langsung ke lokasi objek penelitian. Survei dilakukan dengan cara merekam tinggalan Benteng Sanrobone, diantaranya mencatat hal-hal yang nampak ke dalam catatan lapangan berbentuk deskripsi, dokumentasi dalam bentuk foto dan melakukan pemetaan sebaran potensi sumberdaya arkeologi pada Kawasan Benteng Sanrobone.

3. Wawancara

Tahap wawancara merupakan tahapan ketiga dalam proses pengumpulan data lapangan. Sasaran informan pada metode pengumpulan data ini adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang terlibat pada objek penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini dipilih karena penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena

itu, dalam melakukan wawancara penulis telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Pada teknik wawancara ini setiap informan diberi pertanyaan yang sama, dan penulis mencatatnya.

Penulis menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampel. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan menentukan kriteria tertentu untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi. Adapun kriteria informan yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

- a. Daerah tempat tinggal berada dalam kawasan Benteng Sanrobone
- b. Berusia 25 tahun keatas
- c. Dianggap memiliki pengetahuan tentang Benteng Sanrobone

Alasan pemilihan kriteria pertama karena salah satu sasaran informan dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat yang bermukim dalam Kawasan Benteng Sanrobone. Alasan pemilihan kriteria kedua adalah karena masyarakat yang berusia 25 tahun keatas dianggap mempunyai kapasitas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan alasan pemilihan kriteria ketiga adalah karena tujuan dari teknik pengumpulan data ini untuk mengetahui persepsi masyarakat, serta mengetahui upaya pelestarian dan pengelolaan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

4. Penyebaran Kuesioner Penelitian

Penyebaran kuesioner penelitian dilakukan untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Kawasan Benteng Sanrobone. Sasaran dari metode penelitian ini adalah pengunjung Kawasan Benteng Sanrobone. Poin-poin pertanyaan yang dirumuskan adalah hal-hal yang memuat evaluasi pelestarian dan pengelolaan yang telah terealisasi, serta harapan terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan kedepannya.

Penulis menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampel. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan menentukan kriteria tertentu untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi. Adapun kriteria pengunjung yang penulis tentukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengunjung Kawasan Benteng Sanrobone
- b. Berumur 15 tahun keatas

Alasan pemilihan kriteria pertama karena tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengunjung Kawasan Benteng Sanrobone. Sedangkan alasan pemilihan kriteria kedua karena berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, pengunjung Kawasan Benteng Sanrobone rata-rata berasal dari kalangan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa.

Target responden yang mengisi form kuesioner berjumlah 75 orang. Pemilihan jumlah responden dipilih oleh peneliti, mengacu pada daftar pengunjung Kawasan Benteng Sanrobone yang ramai dikunjungi pada bulan Desember dan Januari. Jumlah orang yang berkunjung per bulan Desember dan Januari adalah 30-35 orang. Sedangkan jumlah pengunjung pada bulan-bulan lain

hanya berjumlah 5-10 orang. Oleh karena itu, pemilihan jumlah responden dianggap dapat mewakili populasi.

Untuk memahami tingkat kepuasan pengunjung, digunakan 8 indikator yang disajikan dalam bentuk form kuesioner penelitian. 8 indikator tersebut antara lain tingkat kepuasan pengunjung terhadap akses, penyediaan papan informasi, ketersediaan sarana dan prasarana, kebersihan, publikasi, pemeliharaan, biaya retribusi serta kenyamanan dan keamanan. Alasan pemilihan 8 indikator yang telah disebutkan di atas karena dianggap dapat menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, karena sasaran dari metode penelitian ini adalah pengunjung. Persepsi pengunjung penting untuk diketahui karena jenis penelitian ini adalah penelitian terapan, yakni penelitian yang menekankan pada aspek manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.5.2 Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data, klasifikasi serta verifikasi data hasil penelitian. Pada tahap pemeriksaan data, penulis melakukan pemeriksaan data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban yang dibutuhkan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Serta melakukan pemeriksaan terhadap data wawancara dan data kuesioner penelitian.

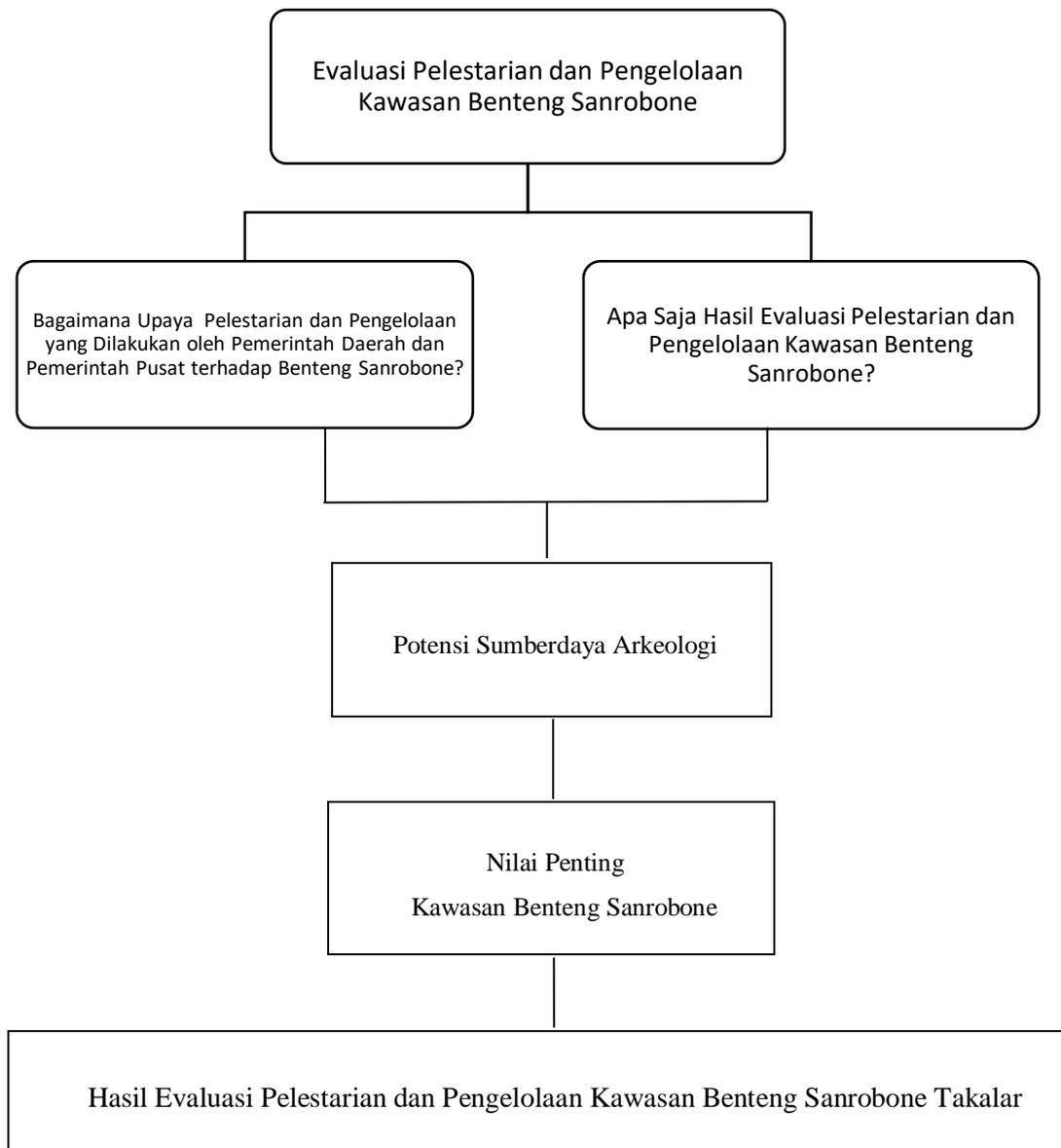
Pada tahap klasifikasi, penulis melakukan pengelompokan data hasil studi pustaka, survey lapangan, data wawancara serta data kuesioner penelitian. Data-data tersebut dibaca dan ditelaah kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami serta dapat

memberikan informasi yang objektif yang diperlukan. Tahap verifikasi dilakukan untuk memeriksa kembali data yang telah diklasifikasi agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

1.5.3 Interpretasi Data

Tahap interpretasi data merupakan tahapan akhir dalam penelitian. Pada tahapan ini dilakukan penafsiran data berdasarkan hasil analisis dalam bentuk deskripsi terperinci, sistematis, logis, dan atas dasar konsep atau teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, tahap interpretasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana upaya pelestarian dan pengelolaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terhadap Benteng Sanrobone serta memberikan informasi mengenai evaluasi pelestarian dan pengelolaan yang telah dilakukan terhadap Benteng Sanrobone yang mengacu pada UU No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya dan UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010.

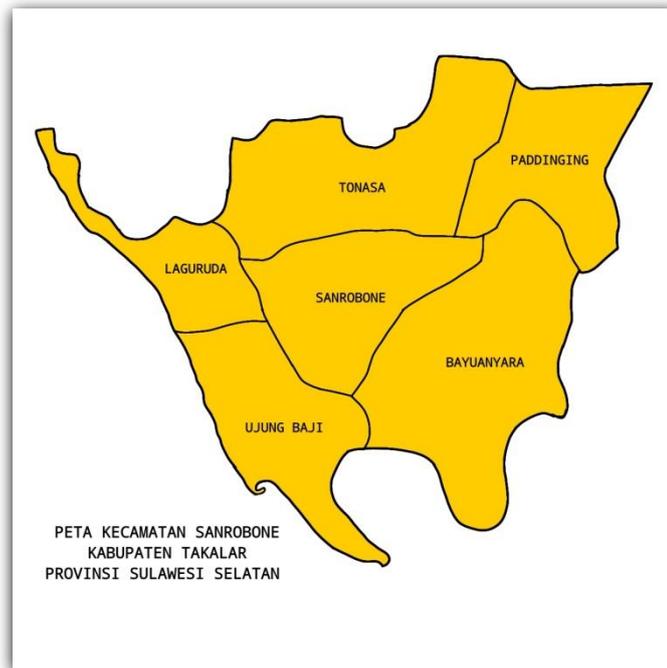
Kerangka Pikir Penelitian:



BAB II PROFIL WILAYAH

2.1 Gambaran Lokasi Penelitian

2.1.1 Keadaan Lingkungan



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar (Tahun 2021)

Kecamatan Sanrobone merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Takalar. Secara geografis wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.
2. Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan laut atau selat Makassar.

Kondisi geografis wilayah Desa Sanrobone pada umumnya dataran tanpa ada bukit yang berketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar daerah ini adalah kawasan persawahan dan di bagian selatan merupakan daerah

tambak yang dikelola oleh masyarakat setempat. Lingkungan vegetasi baik dalam maupun luar, banyak ditumbuhi pohon bambu, nipa dan pandan. Luas Wilayah Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar adalah 29,36 km² yang terdiri dari enam desa, yaitu Desa Sanrobone, Desa Lagaruda, Desa Banyuanyara, Desa Paddinging, Desa Ujung Baji, serta Desa Tonasa. Sedangkan jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten di Kecamatan Sanrobone adalah 0,8 km.

2.1.2 Kondisi Sosial -Ekonomi

a) Jumlah Penduduk

Penduduk wilayah Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar sebanyak 15.257 jiwa, yang terdiri dari penduduk perempuan berjumlah 7.918 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 7.339 jiwa. Lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2021

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1.	Desa Sanrobone	2.850 Jiwa
2.	Desa Lagaruda	1.697 Jiwa
3.	Desa Banyuanyara	3.190 Jiwa
4.	Desa Paddinging	2.054 Jiwa
5.	Desa Ujung Baji	2.636 Jiwa
6.	Desa Tonasa	2.830 Jiwa
	Jumlah Total	15.257 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar (Tahun 2021)

b) Pekerjaan

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar tahun 2021, masyarakat Sanrobone yang berprofesi PNS,

Guru, Tenaga Kesehatan dan Dokter, totalnya berjumlah 463 orang. Masyarakat Sanrobone selebihnya bermata pencaharian antara lain Petani, Nelayan, Pedagang, Wiraswasta, dan lain-lain. Perkembangan daerah ini cukup maju dari segi ekonomi bahkan terbilang makmur dengan komoditi andalan beras, palawija dan hasil tambak.

Tabel 2
Jenis Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2021

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	12
2.	Guru	417
3.	Tenaga Kesehatan	31
4.	Dokter	3
	Total	463

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar (Tahun 2021)

c) Pendidikan Penduduk

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar tahun 2021, jumlah penduduk yang menempuh pendidikan dari jenjang Taman Kanak-kanak hingga Pendidikan Menengah Keatas pada tahun 2020-2021 berjumlah 3.638 jiwa penduduk. Lebih jelas mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Keadaan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2021

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	339
2.	SD/Sederajat	1.541
3.	SMP/Sederajat	792

4.	SMA/Sederajat	966
	Total	3.638

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar (Tahun 2021)

2.1.3 Tradisi / Kebudayaan

Menurut perwujudannya, kebudayaan dapat dipahami dalam tiga aspek, yaitu aspek material, perilaku dan ide. Dalam bentuk material mencakup peralatan hidup, arsitektur, pakaian, makanan olahan, hasil-hasil teknologi, dan lain-lain. Dalam wujud perilaku mencakup kegiatan ritual perkawinan, upacara-upacara keagamaan atau kematian, seni pertunjukan, keterampilan membuat barang-barang kerajinan, dan lain-lain. Dalam wujud ide mencakup antara lain sistem keyakinan, pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma (Anonim, 2010 : 28-29).

Masyarakat Sanrobone merupakan masyarakat yang sangat kental dengan kebudayaannya, terutama yang terkait dengan ritual perkawinan, upacara-upacara keagamaan atau kematian, seni pertunjukan, keterampilan membuat barang-barang kerajinan dan lain-lain. Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Sanrobone yang dilestarikan dari dulu sampai sekarang dapat menjadi jati diri bagi mereka selaku pemilik budaya.